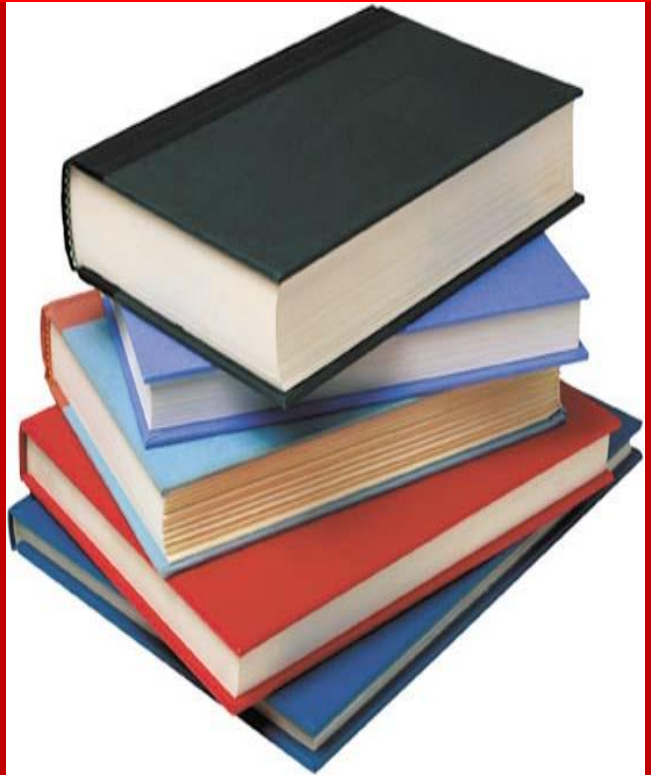




RENCANA KERJA (Renja) SKPD

KELURAHAN KARANGSARI
TAHUN 2015



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Karangsari Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Renja SKPD disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Secara substantif Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rancangan awal perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui penyusunan rancangan rencana kerja, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional, karena rencana kerja lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Dengan disusunnya rancangan rencana kerja yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan Renja SKPD dan selanjutnya RKA, diharapkan terjadi keterpaduan antara perencanaan dan

penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *Planning, programming, and budgeting system* (PPBS).

Akhir kata, semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan program/kegiatan satu tahun ke depan.

Blitar, 6 Juni 2014

LURAH KARANGSARI

JUYANTO, SE, MM

Penata Tk. I

NIP. 19660921 198903 1 009

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	Halaman 1
1.2	Landasan Hukum	Halaman 2
1.3	Maksud dan Tujuan	Halaman 2
1.4	Sistematika Penulisan	Halaman 3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	Halaman 4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	Halaman 13
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	Halaman 16
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Halaman 16
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Halaman 17
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	Halaman 18
3.2	Tujuan dan sasaran Renja SKPD	Halaman 19
3.3	Program dan Kegiatan	Halaman 20
BAB IV	PENUTUP	
	Penutup	Halaman 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undaang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terahir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan Renja SKPD memuathasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dan Renstra SKPD,. Renjaakaan dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD).

Melalui penyusunan Renja SKPD akan dapat dilakukan penyesuaian secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan RPJMD di SKPD yang menyesuaikan dengan perkembangan/ perubahan kondisi sosial ekonomi serta kebijakan pemerintah daerah karena dalam rencana kerja juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan dalam penyusunan rancangan ini diawali dengan pelaksanaan musrenbang sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT,RW,Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah dan pertimbangan terhadap hasil Forum SKPD.

Melalui penyusunan rencana kerja, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional, karena rencana kerjalebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Dengan disusunnya rencana kerjaSKPD tahun 2015 Kelurahan Karangsariyang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan RKA, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *Planning, programming, and budgeting system* (PPBS).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 - 2015;
9. Surat edaran Walikota Blitar Nomor 050/0461/410.202.2/2014 perihal Penyampaian Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kota Blitar 2015;
10. Surat Walikota Blitar nomor : 050/210/410.202.2/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Verifikasi Rancangan Renja SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.
2. Sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kelurahan Karangsari

3. Sebagai dasar / acuan kelurahan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
4. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Karangsari Tahun Anggaran 2015
5. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2015
6. Memberikan gambaran tentang prioritas program yang akan dilaksanakan Kelurahan Karangsari pada Tahun 2015

b. Tujuan

- Sebagai media yang dapat dijadikan sumber dasar penyusunan rencana kerja;
- Agar tersedia kelengkapan dokumen perencanaan yang akan menjadi arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Karangsari Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kelurahan Karangsari pada tahun 2013 dapat dilihat pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun bersangkutan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

Anggaran belanja langsung	: Rp. 584.814.325,00
Realisasi	: <u>Rp. 568.971.535,00</u>
Sisa	: Rp. 15.842.790,00

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 584.814.325,00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dapat terserap sebesar Rp. 568.971.535,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau 94,83% dari pagu anggaran.. Penyerapan anggaran dimaksud dirinci dalam 13 program dan 29 kegiatan. Untuk lebih jelasnya perbandingan anggaran belanja langsung dengan realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	6.460.000,00
Realisasi	: Rp.	3.805.635,00
Sisa	: Rp.	1.570.551,00

Penyebab ada anggaran sisa pada kegiatan ini adalah karena ada efisiensi penggunaan sumber daya listrik dan telepon

2. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	6.551.875,00
Realisasi	: Rp.	6.551.250,00
Sisa	: Rp.	625,00

3. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	4.650.400,00
Realisasi	: Rp.	4.650.000,00
Sisa	: Rp.	400,00

4. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	4.141.000,00
Realisasi	: Rp.	4.141.000,00
Sisa	: Rp.	0

5. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	1.926.750,00
Realisasi	: Rp.	1.926.600,00
Sisa	: Rp.	150,00

6. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	4.440.000,00
Realisasi	: Rp.	4.102.350,00
Sisa	: Rp.	337.650,00

7. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	6.306.000,00
Realisasi	: Rp.	6.293.000,00
Sisa	: Rp.	13.000,00

.B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	29.137.200,00
Realisasi	: Rp.	28.955.000,00
Sisa	: Rp.	182.200,00

2. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	12.258.050,00
Realisasi	: Rp.	12.258.050,00
Sisa	: Rp.	0

Penyebab ada anggaran sisa pada kegiatan ini adalah karena ada kenaikan harga printer sehingga dari 2 buah printer yang dialokasikan hanya terbeli 1 buah.

3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Penyelesaian Pekerjaan: 97,99%

Anggaran	: Rp.	2.946.000,00
Realisasi	: Rp.	2.901.000,00
Sisa	: Rp.	45.000,00

4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	2.842.000,00
Realisasi	: Rp.	2.442.000,00
Sisa	: Rp.	400.000,00

5. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	63.855.000,00
Realisasi	: Rp.	63.828.000,00
Sisa	: Rp.	27.000,00

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	7.120.500,00
Realisasi	: Rp.	7.060.500,00
Sisa	: Rp.	60.000,00

2. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	1.751.850,00
Realisasi	: Rp.	1.651.750,00
Sisa	: Rp.	100.100,00

D. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya

1. Kegiatan : Fasilitas Satgas Penanggulangan Kemiskinan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	57.732.900,00
Realisasi	: Rp.	57.422.900,00
Sisa	: Rp.	310.000,00

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	10.245.300,00
Realisasi	: Rp.	10.215.300,00
Sisa	: Rp.	30.000,00

F. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	19.947.300,00
Realisasi	: Rp.	19.218.300,00
Sisa	: Rp.	729.000,00

2. Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	94.575.050,00
Realisasi	: Rp.	88.069.350,00
Sisa	: Rp.	6.505.700,00

Penyebab ada anggaran sisa pada kegiatan ini adalah tidak ada reorganisasi RT, RW, LPMK karena masa kepengurusan RT, RW, LPMK diperpanjang sehingga alokasi anggaran untuk reorganisasi tidak dapat diserap.

3. Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Penyelesaian Pekerjaan: 100%

Anggaran	: Rp.	100.407.950,00
Realisasi	: Rp.	99.857.950,00
Sisa	: Rp.	550.000,00

4. Kegiatan : Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	72.819.150,00
Realisasi	: Rp.	69.659.650,00
Sisa	: Rp.	3.159.500,00

Penyebab ada anggaran sisa pada kegiatan ini adalah karena ada beberapa peserta pelatihan yang mengundurkan diri. Karena pelatihan ini merupakan pelatihan kelanjutan tahun sebelumnya sehingga peserta yang mengundurkan diri tidak dapat diganti peserta baru sehingga baik alokasi belanja makan minum peserta maupun belanja jasa partisipasi tidak dapat terserap.

G. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	2.121.750,00
Realisasi	: Rp.	2.121.750,00
Sisa	: Rp.	0

2. Kegiatan : Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	1.656.700,00
Realisasi	: Rp.	1.656.600,00
Sisa	: Rp.	100,00

G. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam**1. Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA**

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	11.643.950,00
Realisasi	: Rp.	11.487.950,00
Sisa	: Rp.	156.000,00

H. Program Pengelolaan keragaman budaya**1. Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah**

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	6.550.000,00
Realisasi	: Rp.	6.550.000,00
Sisa	: Rp.	0

2. Kegiatan : Pelestarian petilasan dan adat

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	13.419.000,00
Realisasi	: Rp.	13.419.000,00
Sisa	: Rp.	0

I. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**1. Kegiatan : Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan**

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	12.388.200,00
Realisasi	: Rp.	12.388.200,00
Sisa	: Rp.	0

J. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**1. Kegiatan : Fasilitas keperabsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional**

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran	: Rp.	18.156.000,00
Realisasi	: Rp.	17.981.000,00
Sisa	: Rp.	175.000,00

K. Program pendidikan politik masyarakat**1. Kegiatan : *Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum***

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran : Rp. 3.121.350,00

Realisasi : Rp. 3.121.350,00

Sisa : Rp. 0

L. Program peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah**1. Kegiatan : *Fasilitasi pelayanan prima kelurahan***

Penyelesaian Pekerjaan: 100 %

Anggaran : Rp. 5.643.100,00

Realisasi : Rp. 5.236.100,00

Sisa : Rp. 407.000,00

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan kelurahan sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan sebagai upaya pencapaian visi misi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, Renja Kelurahan Karangsari merupakan penjabaran Renstra Kelurahan Karangsari yang telah ditetapkan dengan merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar yang telah ditetapkan.

Berikut ini disampaikan pula Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Karangsari sampai dengan Tahun 2014:

Tabel. 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Wilayah Kelurahan Karangsari seluas 88,240 Ha terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Blitar. Kelurahan Karangsari terdiri dari 6 RW dan 17 RT dengan jumlah penduduk 5.596 terdiri dari 2.832 orang laki-laki dan 2.764 orang perempuan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 tahun 2011, Kelurahan sebagai satuan perangkat daerah dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Blitar, Kelurahan Karangsari diharapkan senantiasa menjaga dan meningkatkan sinergitas dengan seluruh SKPD yang ada di Kota Blitar, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Seluruh pegawai diharapkan selalu berusaha meningkatkan SDM yang dimiliki dengan mengembangkan diri dan inovatif, membuka diri dan mengimbangi setiap perkembangan teknologi dengan memanfaatkan dan mengembangkan peluang-peluang pendukung dan menekan faktor-faktor penghambat baik yang bersifat internal maupun bersifat external.

Faktor external yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Karangsari antara lain :

1. Belimbing menjadi komoditas unggulan sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat ;
2. Beberapa aktifitas usaha kecil menengah yang berada di kelurahan Karangsari sangat mendukung peningkatan perekonomian lokal ;
3. Tingginya dukungan masyarakat pada pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pemeliharaan ;
4. Dukungan lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan.
5. Pandangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sejarah dan budaya menjadi dukungan tersendiri terhadap upaya pencapaian visi misi kelurahan Karangsari ;
6. Adanya kelompok-kelompok kesenian memberikan wahana yang cukup untuk pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni budaya yang merupakan salah satu misi yang akan dicapai ;
7. Budaya gotong royong masyarakat yang masih tinggi ;

Adapun faktor internal yang mendukung pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Jumlah Pegawai di Kelurahan Karangsari sebanyak 8 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Komposisi Pegawai Kelurahan Karangsari :

No	Jenis kelamin	PNS	Golongan		Pendidikan			
			II	III	SLTP	SLTA	S1	S2
1.	Laki-laki	5	2	3	1	3		1
2.	Perempuan	3	1	2		2	1	

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat jelas bahwa dari segi jumlah, pegawai yang ada di Kelurahan Karangsari sangat jauh dari cukup. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada lampiran Peraturan Walikota Blitar nomor : 9 tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012, rumusan nomenklatur Jabatan Pemerintah Kota Blitar Kelurahan Karangsari terdiri dari 6 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

2. Keberadaan sarana ruang perkantoran yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi Kelurahan Karangsari yang cukup memadai
3. Dukungan dana operasional
4. Sarana transportasi yang dimiliki Kelurahan Karangsari terdiri dari :
 - 4 unit sepeda motor ;
5. Lingkungan dan suasana kerja yang kondusif ;
6. Adanya Standart Operational Prosedure (SOP) masing-masing Kepala Seksi ;
7. Sarana prasarana pendukung yang cukup memadai baik berupa mebelair, elektronik, media informasi dan sarana pendukung lainnya.

Selain faktor pendukung ada juga factor penghambat baik bersifat intern maupun extern yaitu :

Faktor intern yang menghambat :

1. Pegawai yang masih jauh dari standart baik dalam segi jumlah maupun kualitas ;
2. Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi masing –masing personal sehingga sering terjadi kesalahan koordinasi ;

3. Adanya sikap ewuh-pakewuh yang berakibat pada kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang melanggar ;
4. Tingginya ego dinas sektoral yang membuat program kegiatan di kelurahan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kelurahan sehingga menyulitkan pembinaan, pendataan bahkan sering terjadi tumpang tindih sasaran ;
5. Prosedur birokrasi yang panjang dan tidak jelas, aturan yang selalu berubah-ubah serta intervensi kepentingan sering kali membuat petugas mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat :

Faktor external yang menghambat

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kelurahan Karangsari.
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang dipandang tidak berpihak pada masyarakat.
5. Tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis serta semakin meningkatnya peran kontrol masyarakat secara langsung

Dengan memperhatikan berbagai faktor sebagaimana disebutkan di atas dan dengan pertimbangan pencapaian target yang telah ditetapkan telah dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan menekan faktor penghambat. Upaya-upaya dimaksud meliputi :

1. Memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan diri melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
2. Pembinaan pegawai dan mengadakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis.
3. Bekerja dan melaksanakan tugas secara professional.
4. Mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 51 tahun 2011, Kelurahan Karangsari menentukan skala prioritas berbagai usulan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kelurahan yang telah direkap terlebih dulu dengan warga masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah ini dilaksanakan berjenjang setiap tahunnya mulai tingkat RT, RW, Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

Program / kegiatan yang dilaksanakan adalah Program / kegiatan yang sesuai dengan tugas fungsi kelurahan dengan prioritas program kegiatan yang mendukung Program :

1. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat ;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kelurahan, beserta sarana prasarannya serta peningkatan kualitas aparaturnya dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ;
4. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya ;
5. Pengembangan ekonomi lokal dan perluasan lapangan pekerjaan ;
6. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dan pembinaan lembaga masyarakat di kelurahan ;
7. Pelestarian dan konservasi lingkungan dan sumber daya alam;
8. Penumbuhkembangan rasa nasionalisme ;
9. Pengembangan sifat religius pada masyarakat ;
10. Penciptaan rasa aman, nyaman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Pada bagian ini akan ditampilkan gambaran kebutuhan anggaran yang ada pada SKPD (Kelurahan Karangsari) Tahun 2015. Kebutuhan anggaran di Kelurahan Karangsari Tahun 2015 tidak berbeda jauh dengan kebutuhan anggaran pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan gambaran kondisi yang ada pada tahun 2015 tidak berbeda dengan kondisi yang ada pada tahun 2013 dan tahun 2014. Alokasi anggaran untuk Pilkada Gubernur Jatim tahun 2013, Pileg dan Pilpres yang ada pada tahun 2014, juga tetap dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Walikota Blitar tahun 2015 hanya tentu saja nominalnya yang berbeda.

Sedangkan untuk program kegiatan lainnya tidak ada perubahan karena merupakan program/kegiatan yang bersifat berkesinambungan dan program/kegiatan pendukung. Namun demikian dari segi anggaran ada kenaikan. Kenaikan alokasi anggaran ini diperlukan untuk mendukung program Bapak Walikota Blitar **“Satu Kelurahan satu Milyard”** dan untuk mendukung kebijakan **“Nikah Gratis”**

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kelurahan Karangsari diawali dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan baik dari warga masyarakat yang diwakili oleh toga dan toma, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Usulan ini disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang pada setiap tahunnya. Mulai tingkat RT, RW, Kelurahan yang dirangkum dan dilanjutkan pada musrenbang Kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke musrenbang tingkat Kota. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4.

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kelurahan Karangsari	Pembangunan Teras TK AL-HIDAYAH dan Ruang TK PKK (2 Titik)	11,10 x 12,80 M	
2	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Kelurahan Karangsari	Pemeliharaan Jalan Aspal Jl Manggis	300 M	
3	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Kelurahan Karangsari	Pembangunan Saluran 5 Titik	780 M	
4	Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota	Kelurahan Karangsari	Pembangunan Jalan Rabat 3 (Tiga) Titik dan Pembangunan	521 M 200x 1,5M, 750 x 2M	
5	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar permukiman	Kelurahan Karangsari	Pembuatan sumur Bor dan MCK	5 Sumur dan 3 MCK	

6	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kelurahan Karangsari	Pelatihan Pembuatan Komposter	50 Buah komposter	
7	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Kelurahan Karangsari	Pembuatan Para - Para (Anjang-anjang) dan BIOPORI	10 Unit dan 100 bh	
8	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kelurahan Karangsari	Pelatihan Batik jumpit , Pembuatan Keripik Tempe, Menjahit	8 Kelompok	
9	Pembinaan Juru Kunci Makam	Kelurahan Karangsari	Terob Lingkungan , Bedug,Meja,Almari Almunium,Sound	2 Unit dan 3 Jenis	
10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kelurahan Karangsari	Pengadaan Sarana ,Ternak Kroto, Budidaya Jamur, Gergaji Ulir dan Mesin profil	3 Jenis Kegiatan	
11	Pelatihan Kelompok Pemuda Produktif disekitar Pabrik Rokok	Kelurahan Karangsari	Pelatihan Daur Ulang Kain Perca	2 Kelompok	
12	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kelurahan Karangsari	BR2K	13 UNIT	
13	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Kelurahan Karangsari	Revitalisasi lapangan olah raga	1 Unit	
14	Pembangunan turap/talud/bronjong	Kelurahan Karangsari	Pembangunan Plester ,Peninggian Talud dan Rehab Gubug sarasehan,pemb Pagar Tembok Makam	575 M dan 1 Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 51 tahun 2011, Kelurahan sebagai satuan perangkat daerah dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. Oleh sebab itu makna Kelurahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kedudukan

Kelurahan merupakan perangkat daerah berkedudukan dalam wilayah kerja kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Tugas

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Fungsi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Lurah menjalankan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat ;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pembinaan lembaga kemasayarakatan di tingkat kelurahan

Oleh sebab itu semua kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi SKPD Kelurahan Karangsari adalah kebijakan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam satu tahun ke depan adalah :

1. Sebagai wahana kontrol SKPD dalam memberikan arah kebijakan atau gambaran yang akan dicapai ;
2. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada diharapkan ada gambaran untuk menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai satu tahun kedepan ;
3. Sebagai media yang dapat dijadikan sumber dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) ;

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka ditetapkan pula sasaran yang akan dicapai pada satu tahun kedepan. Adapun sasaran tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dan pembinaan lembaga masyarakat di kelurahan dan diharapkan dapat menciptakan pengembangan ekonomi lokal dan perluasan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kelurahan, beserta sarana prasarannya serta peningkatan kualitas aparaturnya dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ;
3. Pengembangan sifat religius pada masyarakat dengan tidak meninggalkan upaya pengembangan dan pelestarian nilai nilai budaya dan diharapkan dapat tercipta tumbuh kembang rasa nasionalisme;
4. Pelestarian dan konservasi lingkungan dan sumber daya alam dan;
5. Penciptaan rasa aman, nyaman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai cara untuk mencari sasaran yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kelurahan Karangsari dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan kehidupan kemasyarakatan dan pelayanan umum menetapkan kebijaksanaan , program untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat juga diperlukan untuk menambah nilai estetika dan kenyamanan bekerja, mendukung pengamanan kantor dan mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak.

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan alat tulis kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 7) Penyediaan makanan dan minuman

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat juga diperlukan untuk menambah nilai estetika dan kenyamanan bekerja, melaksanakan perawatan pada sarana prasarana yang sudah ada agar tidak mudah rusak dan berfungsi lebih lama.

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

C. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;

Sasaran program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terwujudnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Terdiri dari kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.;
2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan.

D. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Data/Informasi/Statistik Daerah ;

Sasaran program ini adalah terwujudnya dokumen data perkembangan potensi kelurahan berupa profil kelurahan di akhir tahun dan data perkembangan statistik kelurahan berupa monografi pada tiap semester.

Terdiri dari kegiatan :

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan.

E. Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat ;

Sasaran program ini adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari fungsi kelurahan.

Terdiri dari kegiatan :

1. Fasilitasi pelayanan prima kelurahan

F. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran program ini adalah Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terdiri dari kegiatan :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

G. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan ;

Sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan program ini adalah terfasilitasinya peningkatan rasa nasionalisme masyarakat melalui peringatan hari-hari besar nasional.

Terdiri dari kegiatan :

1. Fasilitasinya keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional ;

H. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan program ini adalah terfasilitasinya keikutsertaan dalam pelaksanaan event, budaya adat berupa grebeg syuro dan bersih desa.

Terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

2. Pelestarian Petilasan dan adat

I. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan ;

Terfasilitasinya penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diselenggarakan secara bertahap, mulai tingkat RT, RW dan Kelurahan adalah sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini.

Terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan

J. Peningkatan keberdayaan masyarakat ;

Sasaran dari program ini terfasilitasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan /Kelurahan
- 2) Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

K. Pemberdayaan fakir miskin, komonitas adat dan PMKS lainnya ;

Roh dari program ini adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah terfasilitasinya gakin dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan

L. Pendidikan Politik Masyarakat ;

Sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan program ini adalah Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilu Kada Walikota Blitar merupakan sasaran yang akan dicapai pada program ini.

Terdiri dari kegiatan :

1. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum

M. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan program ini adalah terfasilitasinya kegiatan pelestarian

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KARANGSARI TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.20 21	Kelurahan Karangsari				676.131.850			709.938.443
1.20 21 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kelurahan Karangsari	100%	38.073.550		100%	39.977.228
1.20 21 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Kelurahan Karangsari	12 bulan	6.678.000		12 bulan	7.011.900
1.20 21 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pemenuhan ATK	Kelurahan Karangsari	100%	9.607.350		100%	10.087.718
1.20 21 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Karangsari	100%	3.412.500		100%	3.583.125
1.20 21 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Kantor	Prosentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Kantor	Kelurahan Karangsari	100%	2.063.600		100%	2.166.780

1.20	21	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga	Kelurahan Karangsari	100%	2.015.300		100%	2.116.065
1.20	21	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan	Kelurahan Karangsari	1.095 exemplar	5.418.000		1.095 exemplar	5.688.900
1.20	21	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekuensi penyediaan makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu	Kelurahan Karangsari	12 bulan	8.878.800		12 bulan	9.322.740
1.20	21	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Karangsari	80%	90.695.400		75%	95.230.170
1.20	21	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Karangsari	100%	47.562.900		100%	49.941.045
1.20	21	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Karangsari	4 kali	8.346.800		4 kali	8.764.140
1.20	21	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kelurahan Karangsari	3 unit	1.620.400		2 unit	1.701.420
1.20	21	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan mebelair	Kelurahan Karangsari	1 kali	8.700.300		1 kali	9.135.315
1.20	21	02	42	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	Sarana Gedung Kantor yang memadai	Kelurahan Karangsari	1 kali	24.465.000			25.688.250

1.20	21	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase penyampaian perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Kelurahan Karangsari	100%	6.806.100		100%	7.146.405
1.20	21	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Frekuensi penyampaian laporan capaian kinerja SKPD	Kelurahan Karangsari	12 bulan	4.700.600		12 bulan	4.935.630
1.20	21	06	05	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan	Kelurahan Karangsari	4 buku	2.105.500		4 buku	2.210.775
1.13	21	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase meningkatnya keberdayaan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya	Kelurahan Karangsari	30%	56.418.200		35%	59.239.110
1.13	21	15	15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase BOP Satgas Penanggulangan kemiskinan dan pembagian sembako	Kelurahan Karangsari	100%	56.418.200		100%	59.239.110
1.20	21	17		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase luas lahan yang terkonservasi	Kelurahan Karangsari	60%	14.580.600		70%	15.309.630
1.20	21	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi kegiatan penanaman pohon penghijauan	Kelurahan Karangsari	2 kali	14.580.600		2 kali	15.309.630
1.19	21	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Karangsari	60%	8.487.150		65%	8.911.508

1.19	21	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Karangsari	1 kegiatan	8.487.150		1 kegiatan	8.911.508
1.19	21	18		PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	Kelurahan Karangsari	40%	21.048.300		50%	22.100.715
1.19	21	18	05	Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan		Kelurahan Karangsari					
1.19	21	18	10	Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan / even hari besar nasional maupun lokal yang terfasilitasi	Kelurahan Karangsari	4 kegiatan	21.048.300		4 kegiatan	22.100.715
1.19	21	21		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase pendidikan politik masyarakat	Kelurahan Karangsari	75%	10.096.700		80%	10.601.535
1.19	21	21	07	Fasilitasi penyelenggaraan PEMILU	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	Kelurahan Karangsari	2 kegiatan	10.096.700		2 kegiatan	10.601.535
1.22	21	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Kelurahan Karangsari	80%	356.178.700		85%	373.987.635
1.22	21	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	Kelurahan Karangsari	1 kegiatan	13.735.700		1 kegiatan	14.422.485
1.22	21	15	06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga di kelurahan yang difasilitasi	Kelurahan Karangsari	9 lembaga	103.451.000		9 lembaga	108.623.550

1.22	21	15	07	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan sosial dan ekonomi lokal	Kelurahan Karangsari	100%	76.294.500		100%	80.109.225
1.17	21	17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase pengelolaan keragaman budaya	Kelurahan Karangsari	55%	26.223.300		60%	27.534.465
1.17	21	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Frekuensi latihan rutin dan jumlah grup kesenian yang terfasilitasi	Kelurahan Karangsari	12 bulan	6.877.500		12 bulan	7.221.375
1.17	21	17	10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Frekuensi pelaksanaan bersih desa	Kelurahan Karangsari	1 kali	19.345.800		1 kali	20.313.090
1.22	21	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kelurahan Karangsari	70%	13.688.000		75%	14.372.400
1.22	21	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase pelaksanaan musrenbang	Kelurahan Karangsari	100%	13.688.000		100%	14.372.400
1.20	21	31		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan prima	Kelurahan Karangsari	75%	29.410.000		85%	30.880.500
1.20	21	31	03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah kegiatan publikasi pelayanan kelurahan	Kelurahan Karangsari	1 kegiatan	29.410.000		1 kegiatan	30.880.500
1.23	21	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data/informasi/statistik daerah	Kelurahan Karangsari	90%	4.001.500		90%	4.201.575

1.23	21	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi kelurahan	Kelurahan Karangsari	6 buku	2.286.700		32 buku	2.401.035
1.23	21	15	07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	Kelurahan Karangsari	6 buku	1.714.800		43 buku	1.800.540

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja disusun untuk gambaran arah yang akan ditempuh pada satu tahun kedepan. Renja ini merupakan bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Renja disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Juga pada skala SKPD termasuk Kelurahan Karang Sari. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kelurahan Karang Sari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal baik yang bersifat mendukung maupun menghambat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kelurahan Karang Sari selalu mensinergikan diri dengan kebijakan – kebijakan Walikota Blitar dengan mengoptimalkan factor-faktor pendukung dan menekan factor-faktor penghambat.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kelurahan Karang Sari dapat menjadi acuan dalam menentukan arah program kegiatan satu tahun ke depan.

Blitar, 18 Juni 2014
LURAH KARANGSARI

JUYANTO, SE, MM

Penata Tk. I

NIP. 19660921 198903 1 009

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

SKPD : Kelurahan Karang Sari

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2014)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014		SKPD Penan ggung Jawab
								I		II		III		IV										
		6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	6 = 15/6 x 100	17											
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.			
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	80%	59,614,063		23762950		13,886,250								0		0		23,762,950		40%			
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg	53,876,563		23762950		13,886,250								0		0		23,762,950		44%			
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan			5,737,500												0		0		0		0%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%	68,651,875		71307900		55,506,600								0		0		71,307,900		104%			
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin			4,000,000												0		0		0		0%			

Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	64,651,875		71307900		55,506,600									0		0		71,307,900		110%	
																0				0			
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	80%	49,219,560		26995300		8,487,150									0		0		26,995,300		55%	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan timas	20 keg	49,219,560		26995300		8,487,150		6,396,000							6,396,000		75		33,391,300		68%	
																0				0			
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%	87,395,000		32426000		20,046,000									0		0		32,426,000		37%	
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	86,202,500		14445000											0				14,445,000		17%	
Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional	Terlaksananya fasilitasi keperansertaan pada event hari besar nasional				17981000		20,046,000									0		0		17,981,000			
																0				0			

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%	30,477,500		3121350		16,963,550										0		0		3,121,350		10%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum	Terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis ,jujur dan adil		25,000,000		3121350		16,963,550										0		0		3,121,350		12%	
																	0				0			
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%	1,642,237,834		856450608		339,007,050										0		0		856,450,608		52%	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	241,400,500		48842900		13,081,600										0		0		48,842,900		20%	
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	404,146,375		254056750		98,524,700		23,721,600								23,721,600		24		277,778,350		69%	
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	993,340,939		483891308		154,725,000										0		0		483,891,308		49%	
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat	Terlaksananya peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat				69659650		72,675,750		13,353,900								13,353,900		18		83,013,550			
																	0				0			

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya	70%	48,004,585		51223700		24,974,550										0		0		51,223,700		107%	
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	4 klpk	26,453,960		19650000		6,550,000										0		0		19,650,000		74%	
Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan hersih	100%	21,550,625		31573700		18,424,550										0		0		31,573,700		147%	
																	0				0			
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%	44,001,250		16227150		3,810,950										0		0		16,227,150		37%	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	22,450,625		4832650		2,177,800										0		0		4,832,650		22%	
Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	21,550,625		11394500		1,633,150										0		0		11,394,500		53%	
																	0				0			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%	51,721,500		6037500		28,099,300										0		0		6,037,500		12%	
Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	100%	51,721,500		6037500		28,099,300		8,315,300								8,315,300		30		14,352,800		28%	
																	0				0			
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%	31,248,406		32763200		13,036,200										0		0		32,763,200		105%	

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	31,248,406		32763200		13,036,200		9,959,800							9,959,800		76		42,723,000		137%	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya administrasi perkantoran		113,883,658		74975261		37,540,525		12,647,872							12,647,872		34		87,623,133		77%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran		777,953,817		417783850		64,734,925		26,824,250							26,824,250		41		444,608,100		57%	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		39,481,000		23010750		6,481,950		2,626,750							2,626,750		41		25,637,500		65%	

Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA KOTA B LITAR

Disusun
Lurah Karangsari

.....
JUYANTO, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19660921 198903 1 009

